

PERAN LEMBAGA PENCETAK TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) DALAM MEMPERSIAPKAN GENERASI EMAS BANGSA

Florianus Dus Arifian

Prodi PGSD STKIP Santu Paulus, Jl. Jend. Ahmat Yani, No. 10, Ruteng, Flores 86508

e-mail: arifianflori@yahoo.co.id

Abstract: The Role of Education Power Printing Institution (EPPI) in Preparing the Nation's Golden Generation. The golden generation of the Indonesian nation will face challenges that require preparation from the EPPI as an institution that prepares human resources. This paper aims to explore the challenges faced by the golden generation and formulate the role of the EPPI to answer that challenge. To achieve this goal, the author conducted a literature study using the technique of reading and recording. That is, the author reads and records information from relevant library materials. The views of various library materials are critically compiled by the author. The study results show four challenges faced by the golden generation, namely the challenge of bonus demographics, globalization, pluralism, and the fourth industrial revolution. To answer this challenge, EPPI responsibilities include improving the selection process of teacher candidates, intracurricular reform, extracurricular debriefing, printing vocational teachers, and strengthening research or research.

Keywords: The role of EPPI, golden generation, challenges.

Abstrak: Peran Lembaga Pencetak Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam Mempersiapkan Generasi Emas Bangsa. Generasi emas bangsa Indonesia kelak menghadapi tantangan yang membutuhkan persiapan LPTK sebagai institusi yang menyiapkan sumber daya manusia. Tulisan ini bertujuan mengupas tantangan yang dihadapi generasi emas dan merumuskan peran LPTK untuk menjawab tantangan itu. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis melakukan studi pustaka dengan menggunakan teknik baca dan catat. Artinya, penulis membaca dan mencatat informasi dari bahan-bahan pustaka yang relevan. Pandangan dari berbagai bahan pustaka tersebut dikompilasi secara kritis oleh penulis. Hasil studi menunjukkan empat tantangan yang dihadapi generasi emas, yakni tantangan bonus demografi, globalisasi, pluralisme, dan revolusi industri keempat. Untuk menjawab tantangan tersebut, tanggung jawab LPTK mencakup pembenahan proses seleksi calon guru, pembenahan intrakurikuler, pembekalan secara ekstrakurikuler, pencetakan guru vokasi, dan penguatan riset atau penelitian.

Kata kunci: peran LPTK, generasi emas, tantangan.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia akan memasuki usia emas. Namun, zaman generasi emas Indonesia memiliki situasi tersendiri. Terkait dengan hal ini, diprediksi bahwa masa emas nanti merupakan puncak pertumbuhan penduduk usia produktif Indonesia. Oleh karena itu, masa emas akan diwarnai dengan bonus demografi.

Istilah bonus demografi sejatinya baru merupakan kalkulasi yang melahirkan kuantifikasi tertentu tentang struktur demografi pada masa depan. Jadi, istilah tersebut belum menjamin adanya kualifikasi tertentu dalam diri generasi emas nanti. Poinnya adalah bonus demografi bisa menguntungkan jika generasinya

berketerampilan untuk mengemaskan bangsa. Namun, bisa pula membuntungkan jika generasinya tidak berketerampilan sehingga menciptakan pengangguran yang membebankan bangsa.

Selain bonus demografi, generasi emas Indonesia menghadapi globalisasi. Globalisasi merupakan suatu kondisi yang di dalamnya tercipta saling keterhubungan dan ketergantungan pada tingkat global. Dalam globalisasi terjadi peningkatan interdependensi antara umat manusia pada tataran dunia.

Globalisasi menghadapkan generasi Indonesia pada persaingan dengan bangsa lain secara luas dan kompleks sebab globalisasi membaurkan banyak hal seperti etos kerja,

budaya, gaya hidup, dan nilai dari berbagai bangsa di dunia. Persaingan global tersebut memungkinkan generasi Indonesia bisa menjadi pemenang jika memiliki kompetensi untuk bersaing. Namun, generasi Indonesia bisa pula menjadi perahan bangsa lain karena tidak memiliki kompetensi.

Selain tantangan bonus demografi dan globalisasi, bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan pluralisme. Tidak dapat dibantah bahwa Indonesia merupakan bangsa yang heterogen. Setiap elemen dalam keragaman itu berkontribusi bagi keutuhan bangsa. Namun, pada sisi yang lain setiap kelompok memiliki kepentingan yang jika tidak diolah dengan arif akan menjadi bom waktu yang meledakkan keutuhan bangsa.

Generasi emas Indonesia juga menghadapi tantangan revolusi industri keempat. Dalam situasi ini generasi emas dihadapkan dengan penyusutan lapangan pekerjaan oleh karena munculnya sistem digital sebagai panglima kehidupan.

Dalam kaitan dengan tantangan-tantangan di atas, upaya untuk mempersiapkan generasi bangsa perlu digiatkan. Salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah LPTK. Oleh karena itu, peran LPTK layak didiskusikan. Penulis hendak mendiskusikan peran LPTK tersebut. Untuk itu, pertanyaan utama tulisan ini adalah bagaimanakah tanggung jawab LPTK dalam mempersiapkan generasi emas? Untuk menjawab pertanyaan ini dibutuhkan pemahaman tentang tantangan pada masa generasi emas.

PEMBAHASAN

Minimal empat tantangan yang dihadapi generasi emas Indonesia, yakni tantangan bonus demografi, globalisasi, pluralisme, dan revolusi industri keempat. Keempat tantangan ini muncul secara berkelindan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini uraian tentang keempat tantangan itu tidak dipisahkan secara eksak walaupun dibahas dalam masing-masing poin.

Tantangan Bonus Demografi

Bonus demografi dipahami sebagai hadiah di bidang kependudukan karena

ketersediaan tenaga kerja produktif melampaui tenaga kerja nonproduktif. Tenaga kerja produktif berada dalam rentang usia 15 - 64 tahun, sedangkan tenaga kerja nonproduktif berada pada rentang usia 0 - 14 tahun dan 65 tahun ke atas (Payong, 2016: 2). Hal ini bermakna bahwa dalam bonus demografi jumlah remaja, pemuda/i, dan orang dewasa jauh lebih banyak daripada balita, anak-anak, dan lansia. Kelompok yang disebut pertama diyakini lebih mampu bekerja dengan produktivitas yang tinggi. Sebaliknya, kelompok yang disebut terakhir belum mampu atau sudah mengalami involusi kemampuan bekerja sehingga produktivitasnya menjadi lemah.

Secara prediktif bonus demografi mencapai puncaknya sekitar tahun 2020 - 2035. Dalam rentang waktu tersebut jumlah penduduk usia produktif mencapai 70% dari total penduduk Indonesia (Payong, 2016: 2). Akurasi perkiraan ini mulai tergambar jika membaca komposisi penduduk Indonesia pada tahun 2017. Berdasarkan data dari *World Population Prospects* yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Kompas*, 7 Maret 2018, hlm. 11), komposisi penduduk Indonesia pada tahun 2017 terdiri atas 27% penduduk usia 1- 14 tahun, 17% penduduk usia 15 - 24 tahun, 47% penduduk usia 25 - 59 tahun, dan 9% penduduk usia 60 tahun ke atas.

Berdasarkan uraian di atas tantangan pokok dalam bonus demografi adalah bagaimana membekali penduduk usia produktif agar benar-benar produktif atau dapat bekerja sehingga menjayakan bangsa pada masa depan. Jadi, tantangan dalam bonus demografi adalah bagaimana mengkonversi jumlah angkatan kerja yang banyak sebagai kalkulasi prediktif di atas kertas menjadi angkatan kerja yang berkemampuan faktual-objektif untuk bekerja pada tataran riil.

Tuntutan agar memiliki keterampilan produktif bersifat mutlak bagi generasi Indonesia dengan dilandasi minimal dua alasan berikut. *Pertama*, bangsa Indonesia sedang berkembang ke pencapaian kemakmuran seperti bangsa-bangsa maju di dunia. Oleh karena itu, untuk memakmurkan bangsa diperlukan putra-putri bangsa yang beretos kerja tinggi. *Kedua*, seiring dengan munculnya globalisasi, pasar terbuka menjadi salah satu tren perekonomian dunia

(UNESCO, 2005: 9). Dalam kondisi tersebut terjadi ekspansi perdagangan internasional sehingga memungkinkan manusia menjual dan membeli barang dan jasa dari seluruh dunia dari kepompong teritorialnya. Hal ini menimbulkan persaingan produksi barang dan jasa. Pada titik ini, bangsa yang tidak dapat menghasilkan barang dan jasa atau menghasilkan barang dan jasa tetapi berkualitas rendah akan terkucil dalam persaingan.

Untuk membentuk daya produktif tersebut tentu diperlukan penguasaan atas kecakapan teknis dan saintifik. Selain itu, diperlukan kemampuan membangun koneksi pasar dan kemampuan mengakses serta menguasai informasi. Untuk itu juga generasi bangsa perlu memiliki karakter tekun, mengejar atau bekerja sesuai dengan target waktu, mengutamakan efisiensi, dan berorientasi pada profit, serta melek teknologi. Hal-hal seperti ini menjadi kekuatan untuk bekerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan generasi bangsa. Dengan demikian, bonus demografi akan dapat berkontribusi positif dalam menjayakan bangsa.

Tampak pula bahwa ada daya destruktif dari upaya menjawab tantangan bonus demografi itu, yakni hakikat kemanusiaan generasi Indonesia direduksi menjadi sekadar generasi mesin yang harus lincah mengejar penghasilan. Dalam konteks itu putra-putri bangsa Indonesia dilihat hanya sebagai *a tool of economic growth* (Baghi, 2015: 185). Segaris dengan hal itu, pembangunan bangsa lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat ekonomis daripada proses humanisasi, lebih menggunakan parameter ekonomis-teknokratis daripada nilai estetis dan humanitas (Sachari, 2007: 9). Oleh karena itu, pengejaran atas kecakapan teknis dan saintifik tentu baik, tetapi tidak boleh mengabaikan pembentukan dimensi humaniora dan mereduksi makna pembangunan. Generasi bangsa juga membutuhkan pengolahan cita rasa kemanusiaan seperti pengasahan rasa simpati, kecakapan imajinatif, dan rasa seni. Segaris dengan gagasan ini, pembangunan mesti dilihat sebagai upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Tantangan Globalisasi

Globalisasi merupakan suatu kondisi yang berciri saling keterhubungan dan

ketergantungan di antara warga dunia sehingga membuat dunia seolah-olah sempit seperti sebuah desa kecil. Hal ini sejalan dengan pandangan Robertson bahwa globalisasi merupakan suatu proses pemadatan dan intensifikasi kesadaran dunia sebagai suatu keseluruhan; atau Giddens yang melihatnya sebagai suatu proses intensifikasi relasi-relasi sosial seluas dunia yang menghubungkan lokalitas-lokalitas berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa pada satu tempat dipengaruhi peristiwa lain pada tempat lain yang berjauhan (Ujan, dkk., 2011: 7).

Globalisasi sering identik dengan empat hal berikut (Ubaedillah & Rozak, 2012: 55). *Pertama*, internasionalisasi, yakni penguatan hubungan antara negara, perluasan arus perdagangan dan penanaman modal. *Kedua*, liberalisasi, yakni pencabutan pembatasan atau hambatan perdagangan, sirkulasi mata uang, dan izin masuk suatu negara. *Ketiga*, universalisasi, yakni penyeragaman budaya di seantero dunia. *Keempat*, westernisasi, yakni pembaratan gaya hidup. *Kelima*, deterritorialisasi, yakni perubahan-perubahan geografis sehingga ruang sosial menjadi berubah.

Pembaurleburan dunia dalam globalisasi tentu saja membawa sejumlah tantangan. Menurut Kunandar (2011: 37), terdapat minimal lima tantangan globalisasi bagi guru selaku pendidik generasi bangsa. Kelima tantangan itu dielaborasi kembali penulis dengan mempertimbangkan pandangan dari sumber sebagaimana tampak dalam uraian berikut ini.

Pertama, Perkembangan Iptek. Lokomotif penarik globalisasi adalah perkembangan iptek yang sangat tinggi. Dalam kondisi tersebut, guru ditantang untuk bisa menyesuaikan diri dengan responsif dan bijaksana. Artinya, guru harus bisa menguasai dengan baik produk iptek terutama yang berhubungan dengan dunia pendidikan seperti penggunaan multimedia untuk kepentingan pembelajaran. Di samping, guru harus menjadi filter yang dapat menyaring untuk mencegah dampak buruk penggunaan iptek bagi kepentingan pendidikan generasi bangsa.

Kedua, Krisis Moral. Globalisasi dengan seluruh nilai dan produk yang dibawanya dapat melunturkan nilai moral dalam kehidupan bersama pada tataran bangsa. Nilai adiluhung pada setiap bangsa sebagai pedoman moral dapat

mengalami erosi akibat arus globalisasi. Hal ini menyebabkan tumbuhnya anomali sosial yang akhirnya membuat sistem nilai sebagai rujukan menjadi *chaos*. Pada titik ini guru ditantang untuk dapat menjadi benteng moral bangsa.

Ketiga, Krisis Sosial. Melalui kapitalisme dengan ideologi neoliberalnya, globalisasi mengandalkan kecepatan pembangunan, pasar bebas, pelipatan modal, permainan mata uang, ekonomi digital, jaringan kerja, spionase ekonomi, dan penguasaan informasi (Sachari, 2007: 5). Watak seperti itu melahirkan masalah sosial dalam masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran terutama pada negara-negara yang sumber daya manusianya rendah (Tilaar, 2012: 71). Dalam kondisi seperti ini, guru ditantang untuk memberdayakan generasi bangsa terutama kaum yang lemah.

Keempat, Krisis Identitas. Globalisasi dapat memunculkan budaya global yang anonim serentak melengserkan identitas lokal. Hubungan kekerabatan sebagai sistem nilai paling mendasar di dalam masyarakat mengalami reorientasi baru ke arah yang individual dan material karena globalisasi (Sachari, 2007: 6). Karena globalisasi juga pranata sosial mengalami pergeseran. Hal ini tampak jelas dalam iklim demokrasi saat ini yang justru memaraskan demonstrasi dan kritik yang menghujat secara terbuka. Karena globalisasi orang tidak lagi hormat kepada atasan, pemimpin bangsa, dan orang tua sendiri. Hal ini bermuara pada kolapsnya jati diri bangsa. Dalam konteks ini, guru ditantang untuk mendidik generasi bangsa agar memiliki jatidiri yang kokoh sehingga tidak mudah mengambang di tengah arus globalisasi.

Kelima, Perdagangan Bebas. Globalisasi meruntuhkan sekat antara negara dengan aliran produk perdagangan dan kompetensi atau keahlian manusia yang melintas tanpa batas. Maka dari itu, dalam globalisasi terjadi kompetisi antara berbagai negara. Akibatnya, jika generasi suatu bangsa tidak memiliki kompetensi untuk menghasilkan barang dan jasa atau mampu menghasilkan barang dan jasa tetapi dengan kualitas yang rendah, bangsa tersebut akan terlempar ke wilayah periferi. Pada titik ini, guru ditantang untuk mempersiapkan generasi bangsa agar sanggup mengambil bagian dalam

persaingan itu dengan membekalinya sejumlah kompetensi atau keahlian.

Senada dengan pandangan Kunandar, menurut Habur (2007: 34) terdapat sejumlah tantangan globalisasi yang memengaruhi guru selaku pendidik bangsa. Sejumlah tantangan itu tampak pada poin-poin berikut.

Pertama, Munculnya Budaya Materialistik dan Hedonistik. Dalam globalisasi, orang terbius dengan kehidupan yang berlimpah materi dan kenikmatan. Di sisi lain, nilai kesederhanaan dan kerja keras sering dianggap sebagai kebodohan. Kondisi ini mempengaruhi pendidikan ke arah negatif. Dampaknya adalah guru selalu disoroti. Guru selalu menjadi kambing hitam atas munculnya berbagai ketidakberesan pada generasi bangsa. Persoalannya makin rumit ketika guru juga tenggelam dalam situasi yang sama. Tak dapat disangkal, saat ini ada guru yang lebih mengutamakan bisnis sebagai wujud nafsu harta daripada tanggung jawab selaku guru.

Kedua, Mental Cari Gampang. Dengan tersedianya fasilitas dan berbagai kemudahan teknologi, dalam globalisasi orang cenderung mencari jalan pintas untuk mencapai hasil. Muncullah fenomena generasi instan sebagaimana tampak dalam diri orang yang mau sukses, tetapi tidak suka berjuang dengan cara yang pantas, orang yang mau lulus ujian tanpa perlu belajar, orang yang ingin cepat kaya dengan korupsi. Bahkan, mental cari gampang ini sudah mulai merasuki guru. Kasus 1.082 guru di Riau yang memalsukan dokumen agar dapat disebut guru profesional awal tahun 2010 (Buchori dalam *Kompas*, 22 Februari 2010, hlm. 7) merupakan sebuah contoh kecil.

Ketiga, Individualisme. Globalisasi menyebabkan ketergantungan antarindividu dan solidaritas antaranggota masyarakat cenderung melemah. Orang menjadi tidak peduli dengan sesamanya. Tiap orang mengikuti kehendak sendiri. Ikatan moral yang didasarkan kontrol sosial menjadi longgar. Orang muda tidak mau bergantung pada orang tua dalam berbagai urusan, tetapi ingin menentukan sendiri. Dalam ruang kelas, tidak mudah lagi bagi siswa untuk mempercayai nasihat guru sebab siswa merasa diri otonom yang dibungkus dalam individualisme. Kondisi ini semakin parah jika

nasihat sang guru tidak didukung dengan keteladanan.

Keempat, Romantisme dan Sadisme. Ekspresi keakraban dalam globalisasi menampilkan romantisme populer. Hal ini paling kental dipraktikkan oleh generasi muda yang menjadi sasaran pendidikan. Dalam globalisasi pacaran hampir diidentikkan dengan seks. Sejalan dengan itu, muncul juga sadisme. Keakraban kaum muda acap kali melahirkan kelompok geng yang terjebak dalam solidaritas konyol. Maraknya kasus tawuran antara para pelajar hari-hari ini menandakan menguatnya sadisme sekaligus menjadi tamparan bagi guru selaku pendidik generasi bangsa.

Secara khusus dalam konteks pembelajaran di kelas, globalisasi menantang guru pada (1) kepiawaian dalam memanfaatkan sumber dan media pembelajaran dan (2) keteladanan guru dalam sikap dan semangat belajar mandiri (Edu, dkk., 2016: 154). Dalam kaitan dengan poin (1), guru ditantang untuk kreatif, yakni lincah melihat peluang untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber dan media dalam pembelajaran. Selain itu, guru ditantang untuk arif, yakni tidak sekadar menggunakan sumber dan media, tetapi juga mendayagunakannya bagi pembentukan karakter positif siswa (Sumardianta, 2013: 11).

Dalam kaitan dengan poin (2), guru ditantang untuk menjadi model sikap dan semangat belajar secara mandiri kepada siswa. Dalam hal ini, guru diharapkan menunjukkan dari dalam dirinya sikap dan semangat untuk tidak pernah berhenti belajar dan memperbaharui diri dengan berbagai pengetahuan dan informasi. Sikap ini penting mengingat globalisasi ditandai dengan banjir informasi dan pengetahuan yang menuntut penguasaan secara cepat dan tanpa batas akhir. Pada gilirannya, sikap dan semangat untuk selalu belajar dari guru akan mempengaruhi sikap dan semangat belajar siswa.

Tantangan Pluralisme Bangsa

Pluralisme bangsa berarti keadaan majemuk yang dialami suatu bangsa. Kemajemukan tersebut dapat dilihat dari banyak segi terutama suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Sehubungan dengan hal ini, tidak dapat dimungkiri bahwa bangsa Indonesia merupakan

bangsa yang heterogen. Di Indonesia hidup berbagai macam etnis, bahasa, agama, budaya, dan golongan. Kemajemukan tersebut merupakan kondisi yang terberi sejak awal mula oleh Sang Pencipta.

Sadar akan kodratnya sebagai bangsa yang plural, sedari awal nenek moyang bangsa Indonesia telah mengukuhkan keanekaragaman melalui semboyan apik *Bhineka Tunggal Ika* 'berbeda-beda tetapi tetap satu'. Semboyan itu dikukuhkan secara formal melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mengaku berbahasa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu, yakni Indonesia. Legitimasi tentang Indonesia yang memiliki *Bhineka Tunggal Ika* makin kuat di dalam Pancasila selaku dasar negara Indonesia (Atmadja, 2017:3).

Kemajemukan selain sebagai kodrat juga suatu perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang tidak pernah final. Hal ini berarti bahwakeanekaragaman tersebut tidak cukup dikukuhkan secara formal, tetapi mesti dibarengi kesadaran dan gerakan kolektif untuk merawat dan menjaganya sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat watak dasar masyarakat plural adalah askriptif dan primordial. Arogansi dengan merasa diri paling benar dari yang lain bisa tumbuh dengan sangat subur dalam masyarakat majemuk (Ubaedillah & Rozak, 2012: 58). Jadi, masyarakat majemuk sangat rentan dengan konflik.

Gagasan di atas juga bermakna bahwa keanekaragaman bangsa Indonesia mesti dikelola dengan cerdas oleh karena kemajemukan itu dapat memperkuat sekaligus dapat menghancurkan bangsa. Kemajemukan yang dirawat dengan baik tentu menjadi modal sosial yang dapat memperkuat keutuhan bangsa. Dengan menjaga harmonisasi antara berbagai kelompok di dalamnya, Indonesia menjadi bangsa yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan baik yang datang dari dalam maupun luar. Sebaliknya, keragaman yang tidak dijaga dengan baik akan menghancurkan keutuhan bangsa. Hal ini berpeluang terjadi mengingat setiap kelompok dalam keragaman itu tentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pengarusutamaan kepentingan kelompok tentu

akan menimbulkan gesekan yang membahayakan persatuan bangsa.

Ancaman yang membahayakan keutuhan tersebut sesungguhnya mulai menjelma dengan munculnya paham yang menyebarkan ekstremisme kelompok dan gerakan intoleran terhadap keragaman belakangan ini. Menjelang perhelatan elektoral tahun 2018 dan 2019 belakangan ini, misalnya, cenderung digunakan sentiment rasial dan politisasi agama oleh kelompok politik tertentu demi memenangkan politik elektoral (Hendradi, *Kompas*, 3 April 2018, hlm. 7). Dalam strategi ini, api permusuhan di antara kelompok sedang dikobarkan. Contoh yang lainnya, beberapa waktu lalu, seorang anak menjadi korban perundungan di sebuah SD di Jakarta Timur hanya karena wajahnya mirip Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta yang divonis menistakan agama. Sementara itu, meluasnya sikap intoleran juga terekam dalam survei Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 di Kota Singkawang dan Salatiga. Survei tersebut menunjukkan sekitar 25% siswa merasa lebih nyaman jika berteman dengan siswa lain yang sekeyakinan dan 20% siswa hanya bersedia memilih ketua OSIS yang seagama. Hal ini senada dengan temuan survei *The Wahid Institute* pada tahun 2016. Survei tersebut mengungkapkan bahwa dari total 1.520 responden di 34 provinsi, sekitar 59,9% memiliki kelompok yang dibenci seperti non-Muslim, Tionghoa, dan komunis (Kusuman, *Kompas*, 13 November 2017, hlm. 7).

Terlepas dari data empiris di atas, untuk merawat keanekaragaman bangsa tentu diperlukan campur tangan negara. Dalam hal ini negara harus menjamin kebebasan yang setara kepada setiap kelompok. Dengan begitu setiap kelompok akan berkembang dan itu artinya kemajemukan sebagai kekuatan bangsa akan tetap terpelihara. Dalam hal ini negara tetap mempunyai fungsi kontrol, tetapi bukan kontrol yang bersifat represif. Jadi, peran negara mesti dijalankan dalam takaran yang seimbang sebab negara sebagai wadah masyarakat politik menyimpan paradoks (Ujan, dkk., 2011:ix). Dalam hal ini, pada satu sisi, masyarakat politik melalui konstitusi negara mempersatukan berbagai komunitas yang berbeda dalam satu

kesatuan politik. Namun, pada sisi yang lain, ikatan-ikatan komunitas menjadi longgar karena telah ditarik ke dalam satu kesatuan masyarakat politik. Ikatan antara komunitas yang menjadi longgar merupakan isyarat bagi kolapsnya keanekaragaman bangsa.

Paparan di atas belum menghubungkan keanekaragaman bangsa dalam konteks yang lebih luas, yakni globalisasi. Tak dapat ditapis bahwa keanekaragaman bangsa justru mengalami tantangan yang semakin berat di tengah arus globalisasi sebab globalisasi juga mengikutsertakan keanekaragaman tersebut dalam kehidupan global (Tilaar, 2012: 85). Globalisasi tidak hanya mempengaruhi lingkungan konteks negara, tetapi juga lingkungan konteks lokal tempat hidupnya berbagai kelompok atau komunitas yang beraneka ragam.

Dalam kaitan dengan hal di atas, globalisasi mempengaruhi keanekaragaman bangsa melalui cara langsung dan tidak langsung. Dalam cara langsung globalisasi berhadapan *face to face* dengan komunitas-komunitas yang ada dan menggugat eksistensi komunitas-komunitas tersebut lewat nilai-nilai baru yang dibawanya. Dalam hal ini, jika komunitas masyarakat tidak memiliki pertahanan diri yang kuat kolapslah komunitas itu dan itu artinya kolaps pula keanekaragaman bangsa. Sementara itu, dalam cara tidak langsung globalisasi menggugat peran negara. Salah satu bentuk gugatan itu sekarang adalah merebaknya desentralisasi melalui otonomi daerah. Dengan mengusung kebebasan daerah untuk menentukan nasib sendiri, globalisasi juga sedang memperlemah peran negara terhadap daerah. Ketika peran negara menjadi lemah lahirilah praktik otonomi daerah yang kebablasan seperti tampak dalam fenomena 'negara' di dalam negara yang sah, primordialisme, etnosentrisme, dan sejenisnya. Hal ini bukan lagi peringatan sebab fakta menunjukkan bahwa dengan pencanangan otonomi daerah, kondisi daerah tidak semakin membaik, tetapi semakin memupuk jiwa kedaerahan sempit dan fanatisme kesukuan (Sachari, 2007: 6). Hal ini tentu selain merugikan kelompok yang beranekaragam juga meruntuhkan eksistensi bangsa Indonesia.

Dari uraian di atas tampak bahwa pluralisme merupakan salah satu tantangan

generasi bangsa Indonesia pada hari ini dan ke depan. Jika dirawat dengan baik, keanekaragaman tersebut menjadi modal mahapenting bagi pembentukan bangsa Indonesia yang kokoh dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal. Sebaliknya, jika tidak dijaga dengan baik, keanekaragaman itu menjadi bom waktu yang suatu saat meledakkan bangsa Indonesia.

Di dalam rangka merawat pluralisme tersebut dibutuhkan pembentukan wawasan dan sikap multikultural pada putra-putri bangsa. Generasi bangsa hendaknya tidak hanya berada sekadar berbeda antara satu kelompok dan kelompok lain, tetapi memandang perbedaan itu sebagai kesempatan untuk mewujudkan hakikat sosial manusia dengan dialog dan komunikasi (Ubaedillah & Rozak, 2012: 59). Hal ini berarti generasi bangsa perlu memiliki keterbukaan terhadap kisah dan narasi hidup serta kultur kelompok lain, memandang setiap keberlainan dengan cita rasa kemanusiaan yang kaya makna dan penuh empati (Baghi, 2015: 183), menghargai perbedaan pada setiap kelompok, dan memperlakukan setiap kelompok yang berbeda-beda secara setara dengan kelompok sendiri.

Tantangan Revolusi Industri Keempat

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membawa dunia saat ini pada tantangan revolusi industri keempat (*industry 4.0*). Dalam era revolusi *industry 4.0* ini berkembang sistem fisik-siber yang menyatukan dunia fisik, digital, dan biologis sehingga melahirkan ekonomi berbasis digital. Terlepas dari dampak positifnya, sistem ekonomi digital membawa sejumlah dampak disruptif. Salah satunya adalah penyusutan lapangan pekerjaan manusia. Saat ini jutaan pekerjaan yang semula biasa dilakukan secara manual mulai berkurang karena digantikan oleh mesin, robot, dan perangkat komputasi lainnya. Dalam bidang transportasi dan wisata, misalnya, banyak biro perjalanan dan wisata tradisional yang ditutup karena munculnya layanan transportasi dan wisata berbasis digital seperti Traveloka. Dalam bidang perbankan, misal yang lainnya, banyak karyawan yang dirumahkan karena munculnya

mesin *teller* yang melayani konsumen secara *online*.

Dampak disruptif lain dapat dilihat dalam bidang pendidikan terutama dalam bidang pembelajaran. Dalam bidang pembelajaran, sistem digital menyebabkan guru mulai menghadapi bahaya disintermediasi karena perannya mulai digantikan oleh internet yang mengemas pembelajaran berbasis *online*. Bahaya disintermediasi merupakan suatu kondisi di mana peran guru selaku mediator atau perantara pembelajaran menjadi kurang relevan dan akhirnya tersingkir oleh internet (Priyatma dalam *Kompas*, 27 April 2016, hlm. 7).

Di bidang sosial sistem digital tersebut melahirkan persoalan yang mencabik-cabik keharmonisan manusia baik pada ruang pribadi maupun ruang sosial. Keharmonisan manusia pada ruang sosial terganggu lewat muncul dengan masifnya ujaran kebencian dan hoaks melalui sistem digital. Sementara itu, keharmonisan manusia pada ruang privat terganggu lewat munculnya pencurian data pribadi pengguna media sosial oleh perusahaan media digital.

Untuk menghadapi ancaman kehilangan lapangan pekerjaan, disintermediasi, dan disharmonisasi manusia dalam era digital tentu diperlukan *skill* tertentu. *Pertama*, generasi bangsa perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan sistem digital. Hal ini terutama berlaku bagi orang yang sudah memiliki pekerjaan agar tidak tersingkirkan oleh sistem digital. *Kedua*, generasi bangsa perlu memiliki jiwa wirausaha yang kreatif dan inovatif. Hal ini tentu dimulai dengan kemampuan membaca peluang berwirausaha. Setelah mampu memetakan peluang wirausaha, generasi bangsa harus mampu menciptakan sesuatu yang khas/unik. Generasi dengan kompetensi seperti ini sangat cocok untuk menghadapi era digital yang diwarnai industri-industri kreatif. *Ketiga*, generasi bangsa juga perlu memiliki kecerdasan literasi digital. Dengan kecerdasan tersebut, generasi bangsa mampu menguasai serentak dapat bertindak etis untuk diri sendiri dan orang lain di hadapan media digital.

Dari empat jenis tantangan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, bonus demografi menghadapi generasi Indonesia pada tuntutan pemilihan daya produktivitas. *Kedua*, globalisasi menghadapi

generasi Indonesia pada tuntutan pemilikan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan global sambil tetap mempertahankan jati diri. *Ketiga*, pluralisme bangsa menghadapi generasi Indonesia pada tuntutan mengakui dan menghargai perbedaan agar tetap kokoh. *Keempat*, revolusi industri keempat menghadapi generasi bangsa pada tuntutan dunia digital yang mengancam eksistensi lapangan pekerjaan yang bersifat manual.

TANGGUNG JAWAB LPTK

Untuk menghadapi keempat tantangan generasi emas di atas, LPTK sebagai institusi yang menghasilkan pendidik generasi bangsa memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi. Menurut penulis, tanggung jawab LPTK dapat ditunjukkan dalam poin-poin di bawah ini.

Pembenahan Proses Seleksi Calon Guru

Oleh karena mengemban misi luhur sekaligus berdampak besar dan panjang bagi pembentukan kualitas generasi bangsa melalui tenaga guru yang dihasilkannya, LPTK perlu melakukan proses seleksi calon guru secara berkualitas. Seleksi calon guru sejalan dengan implikasi dari salah satu tesis bernas Fullan (2007: 129) bahwa kelas dan sekolah akan efektif jika guru direkrut dari orang-orang yang berkualitas. Pada titik ini, perekrutan guru yang berkualitas di antaranya mencakup proses seleksi yang berkualitas atas calon guru.

Dalam proses seleksi calon guru, LPTK perlu berfokus pada dua aspek, yakni aspek kuantitas dan aspek kualitas. Dari aspek kuantitas, LPTK perlu memperhatikan dengan serius keseimbangan antara jumlah calon guru yang diterima dan daya dukung berbagai sumber daya yang dimilikinya terutama jumlah sumber daya manusia (dosen dan pegawai) serta jumlah sarana dan prasarana. Sehubungan dengan hal ini, imbauan imperatif untuk membangun lembaga pendidikan tinggi sehat yang ditandai dengan keseimbangan rasio antara mahasiswa dan dosen yang ditegaskan Dikti saat ini harus menjadi pertimbangan utama LPTK dalam proses seleksi. Kalaula pada masa-masa sebelumnya LPTK sempat memunculkan fenomena massalisasi dengan menerima calon mahasiswa dalam jumlah yang

melampaui daya dukung, saat persiapan generasi emas ini merupakan momentum untuk menciptakan LPTK sehat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah calon yang diterima dengan daya dukung yang tersedia.

Dari aspek kualitas, LPTK perlu memiliki suatu model seleksi yang memang dapat menyadap dengan valid kualitas calon guru yang diterima dan dibentuknya. Sehubungan dengan hal ini, ada dua fokus yang perlu diperhatikan LPTK, yakni (1) kemampuan akademik calon dan (2) bakat atau *passion* (panggilan jiwa) calon untuk menjadi pendidik. Dalam praktiknya, sejauh ini LPTK lebih banyak mengeksplorasi kemampuan akademik dan jarang menggali *passion* calon, padahal *passion* sangat kuat mempengaruhi kualitas guru yang akan dihasilkan. Minimnya perhatian pada aspek *passion* dibuktikan melalui penelitian *Paramadina Public Policy Institute* (PPPI) yang menemukan bahwa sejauh ini LPTK belum menyediakan persyaratan khusus untuk calon mahasiswa yang akan diterimanya (*Kompas*, 6 Januari 2016, hlm. 11).

Passion berhubungan dengan keseriusan calon untuk menjadi guru. *Passion* berkaitan dengan energi atau kekuatan internal pada kedalaman jiwa sang calon yang mendorongnya untuk memilih dan terus mencintai panggilan hidup sebagai guru. Dengan demikian *passion* menjadi semacam motivasi intrinsik yang senantiasa menyemangati dan menginspirasi seseorang untuk memutuskan dan berpegang teguh pada keputusan untuk memilih dan bertahan hidup sebagai guru. Pada dampak yang lebih jauh, *passion* menjadi kekuatan penentu bagi segenap upaya peningkatan profesionalisme guru. Abduhzen (*Kompas*, 25 November 2015, hlm. 6), misalnya, mengatakan bahwa kegagalan program sertifikasi guru masa kini, yakni lebih berdampak pada peningkatan ekonomi daripada kompetensi guru, disebabkan oleh kondisi bahwa sedari awal kebanyakan guru mengalami krisis panggilan hati atau kegersangan *passion* untuk menjadi guru. Oleh karena itu, pada momentum persiapan generasi emas saat ini LPTK perlu memberikan perhatian serius pada aspek *passion* calon guru dalam proses seleksi.

Pembenahan Intrakurikuler

Dalam rangka mempersiapkan generasi emas LPTK dapat melakukan pembenahan secara intrakurikuler. Ini berarti LPTK perlu menata dengan cermat standar isi kurikulumnya. Perhatian yang cermat pada standar isi kurikulum tidak berarti LPTK mengabaikan standar proses untuk mengolah isi tersebut dan standar evaluasi untuk melihat ketercapaian tujuannya yang dihubungkan dengan standar isi dan proses. Sehubungan dengan pembenahan standar isi kurikulum, minimal dua titik refleksi berikut ini perlu menjadi pertimbangan LPTK.

Pertama, Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG). Jika berkaca pada hasil UKG tahun 2015, tampak bahwa nilai rata-rata terendah, yakni 48,94, diperoleh pada kompetensi pedagogis, jauh di bawah kompetensi profesional sebesar 54,77 (*Kompas*, 31 Desember 2015, hal. 9). Hasil ini menunjukkan bahwa guru lebih menguasai konten atau isi materi daripada cara atau strategi menyampaikan materi kepada siswa. Dengan perkataan lain, guru lebih menguasai isi bidang studi daripada kemampuan yang berhubungan dengan pengelolaan pembelajarannya yang di antaranya mencakup penguasaan terhadap berbagai strategi dan metode pembelajaran. Pada titik ini patut diduga pula bahwa idealisme untuk menciptakan kemandirian belajar siswa sebagai kebutuhan mahapenting dalam era globalisasi yang ditandai banjir informasi masih sangat sulit untuk diwujudkan. Alasannya, kemandirian belajar siswa tidak terutama datang dari konten atau isi pembelajaran, tetapi datang dari strategi yang digunakan oleh guru. Dalam ilustrasi yang konkret, siswa tentu tidak bisa mandiri jika kepadanya hanya diberikan ikan, tetapi ia hanya bisa mandiri jika kepadanya diberikan kail untuk memancing ikan.

Kedua, Penelitian tentang Isi Kurikulum LPTK. Hasil penelitian PPPI baru-baru ini menemukan minimnya porsi mata kuliah keguruan pada LPTK, yakni hanya sekitar 20% dari seluruh materi atau rata-rata hanya 29 dari 150 satuan kredit semester (SKS); padahal semestinya porsi mata kuliah keguruan adalah sepertiga dari total mata kuliah (*Kompas*, 06 Januari 2016, hal. 11). Patut dicermati bahwa temuan tersebut seakan mengungkapkan alasan rendahnya penguasaan kompetensi pedagogis

guru yang terungkap melalui hasil UKG tahun 2015 di atas. Artinya, dapat diduga bahwa minimnya kompetensi pedagogis guru disebabkan oleh kurangnya porsi mata kuliah pedagogis yang diterimanya ketika belajar di LPTK.

Berdasarkan dua poin di atas, tampak bahwa LPTK perlu membenah isi kurikulumnya dengan memberikan porsi yang memadai untuk rumpun mata kuliah pedagogis atau kependidikan. Hal ini penting mengingat penciri khas guru sebagai *out put* LPTK terletak pada penguasaan kompetensi pedagogis yang dibentuk melalui rumpun mata kuliah pedagogis.

Perhatian pada rumpun mata kuliah pedagogis sama sekali tidak berarti bahwa rumpun mata kuliah nonpedagogis dapat diabaikan begitu saja. LPTK juga perlu memberikan perhatian yang memadai pada mata kuliah nonpedagogis. Sejalan dengan hal ini, mata-mata kuliah yang mengarah pada penguatan wawasan kebangsaan kepada calon guru, semisal pendidikan pancasila dan multikulturalisme, perlu digarap dengan optimal oleh LPTK. Hal ini penting dalam rangka membentuk kecerdasan untuk menjaga keanekaragaman bangsa Indonesia pada calon guru yang kemudian menjadi kekuatan yang dapat ditulkarkannya kepada generasi bangsa.

Selain itu, rumpun mata kuliah yang mengarah pada pembentukan kemampuan berusaha atau produktif perlu diperhatikan oleh LPTK. Mata kuliah semacam itu dapat membekali calon guru kemampuan untuk menghasilkan sesuatu entah barang entah jasa. Mata kuliah semacam itu dapat menyemai dan memupuk benih wirausaha pada calon guru yang selanjutnya menjadi kekuatan untuk membentuk keterampilan melakukan sesuatu atau daya produktif pada diri generasi bangsa.

Hal lain yang perlu diperhatikan LPTK sehubungan dengan pembenahan pada standar isi kurikulum adalah penyelarasan kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dicanangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Dengan penyelarasan kurikulum dalam konteks KKNI, *out put* LPTK memiliki acuan kesetaraan kompetensi di tengah kebervariasaian persoalan mutu pendidikan di dalam negeri dan di tengah tuntutan dan persaingan mutu sumber

daya manusia tingkat global (Payong, 2015: 65). Dengan menyelaraskan kurikulum dalam KKNI, tamatan LPTK bangsa Indonesia memiliki barometer yang dapat disandingkan dengan tamatan sekolah guru dari bangsa lain di dunia sehingga mampu berperan dalam tantangan globalisasi.

Sementara itu, dalam kaitan dengan pembenahan pada standar proses untuk mengolah isi kurikulum LPTK harus mengedepankan model-model perkuliahan partisipatori yang dielaborasi dengan model-model perkuliahan berbasis interaksi multimedia digital. Model-model perkuliahan partisipatori sangat penting dalam rangka melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi pada calon guru sebagai bekal menghadapi tuntutan kompetensi yang tinggi pada era persaingan global. Model-model perkuliahan berbasis interaksi multimedia digital juga sangat penting dalam rangka membekali calon guru kemampuan untuk mengelola pembelajaran secara visual-interaktif yang sangat dibutuhkan pada era generasi emas.

Adapun dalam kaitan dengan pembenahan pada standar evaluasi untuk mengukur ketercapaian isi kurikulum LPTK perlu menggunakan model-model penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan bentuk penilaian yang mengharuskan si pebelajar mengerjakan tugas nyata sebagai wujud aplikasi yang bermakna dari pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasainya. Dalam penilaian ini, si pebelajar dituntut untuk mengerjakan sesuatu yang relevan dengan situasi di lapangan kehidupan.

Pembekalan Secara Ekstrakurikuler

Tidak dapat dibantah bahwa tuntutan dunia kerja tidak selalu sejalan dengan pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan. Senada dengan hal ini, tantangan hidup yang dialami calon guru, apalagi tantangan hidup pada zaman globalisasi yang serba kompleks dan penuh dengan ketidakpastian, tidak sepenuhnya dapat diantisipasi secara intrakurikuler melalui perkuliahan di LPTK. Hal ini memberi sinyal tentang pentingnya pembekalan keahlian lain pada calon guru oleh LPTK. Beberapa contoh keahlian lain yang perlu dibentuk pada calon guru dewasa ini adalah kemampuan memimpin,

kemampuan berorganisasi, dan kemampuan membuka peluang usaha (*Kompas*, 19 Juni 2015, hlm. 11).

Pembekalan kompetensi seperti disebutkan di atas dapat dilakukan secara ekstrakurikuler atau di luar perkuliahan secara formal. Dalam konteks ini LPTK perlu menggelar pelatihan-pelatihan secara intens yang dapat menggali dan membina kemampuan mahasiswa di luar aktivitas perkuliahan. Segaris dengan hal ini, berbagai unit kegiatan mahasiswa (UKM) jangan dibiarkan mati suri oleh LPTK. Berbagai kelompok UKM yang mendorong mahasiswa calon guru untuk berkelompok berdasarkan bidang bakat dan minatnya perlu didukung secara optimal oleh LPTK. Penempatan melalui kelompok-kelompok UKM dapat berefek pada terbentuknya keahlian untuk menjawab tantangan hidup yang tidak selaludapat dipersiapkan atau diantisipasi melalui perkuliahan formal di kelas. Beberapa bentuk UKM yang perlu dihidupi oleh LPTK adalah UKM kewirausahaan, UKM kepariwisataan dan budaya, UKM kerohanian, UKM seni dan gerak, UKM forum diskusi ilmiah, UKM olahraga, UKM bela diri, UKM band, UKM jurnalistik, dan sebagainya.

Pencetakan Guru Vokasi

Telah disinggung dalam tulisan ini bahwa era generasi emas cenderung diwarnai oleh industri-industri kreatif yang bersifat eksklusif dan unik. Untuk mengantisipasi peluang munculnya industri kreatif tersebut tentu perlu dikembangkan berbagai program pendidikan vokasi atau sekolah kejuruan. Setidaknya ada empat bidang studi yang amat penting untuk dipersiapkan dalam program vokasi, yakni kelautan, pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif (*Kompas*, 7 Maret 2018, hlm. 11).

Dalam hubungan dengan pengembangan program vokasi tersebut, partisipasi LPTK bukan terutama pada pendirian sekolah kejuruan walaupun hal tersebut berpeluang untuk dilakukan dalam rangka membangun sekolah kejuruan percontohan. Menurut penulis, partisipasi LPTK sesungguhnya lebih pada menyiapkan tenaga guru vokasi sebagai pendidik pada sekolah kejuruan tersebut. Tugas ini sangat

penting dan mendesak sebab sejauh ini LPTK belum menyiapkan secara khusus guru untuk program vokasi. Se jauh ini LPTK belum mencetak secara khusus guru ekonomi kreatif, guru pariwisata, guru pertanian, guru agrobisnis, guru teknik mesin, dan guru pada bidang-bidang sejenisnya.

Pada sisi yang lain, sejauh ini usaha untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru untuk program vokasi cenderung dilakukan dengan minimal dua cara berikut. *Pertama*, merekrut calon pendidik dari lulusan politeknik. Namun, cara ini tidak mudah sebab lulusan politeknik lebih tertarik bekerja di bidang industri yang mendatangkan penghasilan yang lebih besar daripada bekerja pada bidang pendidikan (seperti bekerja di sekolah menengah kejuruan/SMK) dengan penghasilan yang pas-pasan (*Kompas*, 7 Maret 2018, hlm. 12). *Kedua*, mengalihfungsikan guru yang ada (adaptif dan normatif). Cara ini tentu berisiko karena umumnya ada ketidaksesuaian antara bidang keahlian guru dengan bidang yang diajarnya.

Jika dicermati, kedua cara di atas memiliki kelemahan yang dapat ditilik dari kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional seorang guru. Cara pertama tentu hanya menghasilkan guru yang kuat pada kompetensi profesional (penguasaan konten keahlian), tetapi lemah pada kompetensi pedagogik (penguasaan cara menyampaikan konten keahlian kepada peserta didik). Sebaliknya, cara kedua hanya menghasilkan guru yang kuat pada kompetensi pedagogik, tetapi lemah pada kompetensi profesional.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, sudah saatnya bagi LPTK untuk memikirkan dan melakukan aksi nyata dalam bentuk menyiapkan secara khusus tenaga guru vokasi. Dengan penyiapan khusus tersebut akan tersedia tenaga guru vokasi yang kuat dari kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Upaya ini tentu mengandaikan adanya pembukaan program studi baru oleh LPTK yang sejalan dengan kebutuhan keahlian guru vokasi.

Penguatan Riset

LPTK dapat memperkuat bidang riset/penelitian dalam rangka mempersiapkan generasi emas bangsa Indonesia. Upaya ini

menjadi relevan karena abad globalisasi yang dihadapi generasi emas diwarnai banjir data. Pihak yang menguasai data akan menjadi kekuatan hegemonik dalam kancah persaingan. Data tersebut tentu tidak sekadar dikuasai, tetapi perlu diuji dan dikritisi melalui kegiatan riset atau penelitian.

Menurut penulis, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh LPTK dalam penguatan riset untuk mempersiapkan generasi emas, yakni orang yang melakukan riset dan objek atau sasaran dari riset. Sehubungan dengan poin pertama, pelaku dari kegiatan riset hendaknya bukan hanya dosen melainkan juga mahasiswa calon guru di LPTK itu. Dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan riset, LPTK sesungguhnya sedang memperkuat kapasitas calon guru untuk menjadi insan yang selalu meragukan/mempertanyakan kebenaran data yang ada sehingga terbentuk jiwa kritis. Hal ini selanjutnya menjadi kekuatan yang dapat dibagikan kelak oleh guru selaku *out put* LPTK kepada generasi bangsa di sekolah.

Dalam kaitan dengan hal kedua, objek kegiatan riset dari LPTK hendaknya tidak hanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan modern, tetapi juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan tradisional, yakni kearifan dan kebudayaan lokal yang ada pada setiap kelompok atau suku bangsa di Indonesia (Tilaar, 2010: 224). Dalam konteks ini, perlu disadari bahwa LPTK sesungguhnya merupakan miniatur dari masyarakat di sekitarnya sehingga tidak dapat terlepas dari kebudayaan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, LPTK harus berpartisipasi aktif dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan lokal. Jika menutup mata terhadap nasib kebudayaan lokal, LPTK sesungguhnya sedang menjerumuskan diri dalam dua dosa besar: (1) mengingkari lingkungan masyarakat sekitar yang mewadahnya, dan (2) menggiring kebudayaan lokal ke alam kematian.

Salah satu contoh segmen kebudayaan lokal yang perlu menjadi fokus riset LPTK adalah bahasa lokal. Objek ini penting diteliti selain karena bahasa lokal lebih banyak diwariskan secara lisan sehingga rentan terhadap ancaman kepunahan, juga karena fakta bahwa globalisasi juga turut menumbuhkan imperialisme linguistik, yakni suatu kondisi di mana bahasa global telah menghalangi penggunaan literasi

bahasa ibu, telah mencegah kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal yang tidak mempelajari bahasa global. Hal ini kemudian mendesak orang-orang lokal untuk lebih mengutamakan bahasa global daripada bahasa lokal (Brown, 2008: 226).

Selain bahasa lokal, objek riset LPTK juga dapat berupa nilai-nilai lokal (*local values*) yang didesain dalam bentuk penelitian dan pengembangan (*research and development*) untuk memebangkan pedagogi berbasis kearifan lokal bangsa Indonesia. Hal ini urgen untuk mengimbangi pedagogi impor dari Barat yang dari aspek tertentu tidak kontekstual dengan situasi bangsa Indonesia. Beberapa contoh pedagogi yang telah dikembangkan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) seperti Sekolah Harmoni Hijau di Singkawang dan Sambas, Pendidikan Harmoni di Poso, dan Pendidikan Kulababong di Sika (*Kompas*, 20 Januari 2017, hlm. 11) dapat menjadi model untuk diikuti oleh LPTK.

Penguatan riset dengan objek riset berupa tradisi/kebudayaan lokal oleh LPTK dimaksudkan untuk memperkokoh identitas budaya generasi bangsa di hadapan ancaman budaya global yang anonim sebagai dampak dari globalisasi. Dengan keberpihakan riset LPTK semacam itu, keanekaragaman bangsa tetap terawat baik untuk harmonisasi internal generasi bangsa maupun untuk menghadapi tantangan globalisasi.

Dari paparan di atas dapat ditegaskan bahwa tanggung jawab LPTK dalam menyiapkan generasi emas dapat diwujudkan melalui lima bentuk. Kelima bentuk itu mencakup pembenahan proses seleksi calon guru, pembenahan intrakurikuler, pembekalan secara ekstrakurikuler, pencetakan guru vokasi, dan penguatan riset.

KESIMPULAN

Generasi emas bangsa Indonesia pasti tidak bisa luput dari tantangan bonus demografi, globalisasi, pluralisme, dan revolusi industri keempat. Dalam bonus demografi, generasi bangsa dituntut agar memiliki keterampilan produktif dengan menguasai kecakapan teknik-saintifik dan tanpa mengabaikan kecakapan estetis-imajinatif. Dalam globalisasi, generasi bangsa menghadapi tantangan multidimensi

sebab globalisasi membaurkan warga dunia dengan berbagai budaya. Sementara itu, pluralisme bangsa menghadapi generasi pada tantangan untuk menjaga keutuhan bangsa yang memang secara kodrat diwarnai keanekaragaman dalam banyak segi. Dalam tantangan revolusi industri keempat, generasi bangsa dituntut agar siap menghadapi penyusutan lapangan pekerjaan.

Untuk menghadapi tantangan di atas, perlu ada upaya persiapan sumber daya generasi bangsa. LPTK dapat memainkan peran di sini. Untuk itu, LPTK perlu melakukan pembenahan proses seleksi calon guru, pembenahan intrakurikuler, pembekalan secara ekstrakurikuler, pencetakan guru vokasi, dan penguatan riset atau penelitian. Dalam pembenahan proses seleksi calon guru LPTK perlu memperhatikan aspek kuantitas, yakni memperhitungkan jumlah calon yang diterima dengan daya dukung yang ada. Selain itu, LPTK perlu memperhatikan aspek kualitas terutama *passion* calon untuk menjadi guru. Dalam pembenahan intrakurikuler LPTK perlu menata standar isi, standar proses, dan standar evaluasi kurikulum. Dalam pembenahan secara ekstrakurikuler LPTK perlu membekali calon guru dengan keterampilan lain selain keterampilan utama sebagai guru melalui kegiatan UKM. Dalam pencetakan guru vokasi, LPTK menyiapkan secara khusus tenaga guru yang sejalan dengan bidang-bidang keahlian pada sekolah kejuruan. Sementara itu, dalam penguatan riset LPTK perlu melibatkan calon guru dalam melakukan riset dengan objek riset berupa kebudayaan lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abduhzen, M. 25 November 2015. "Politik Guru". *Kompas*, hlm. 6.
- Admadja, N. B. 2017. "Pendidikan Multikultural dalam Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia". *Makalah disajikan dalam Seminar Nasional*, Prodi PGSD STKIP St. Paulus Ruteng, Maret 2017.
- Baghi, F. 2015. "Pendidikan Multikultural dan Globalisasi: untuk Profit atau *Cultivating Humanity*?". *Jurnal*

- Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 7 (2): 178—187.
- Brown, H. Douglas. 2008. *Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa*. Jakarta: Keduataan Besar Amerika Serikat.
- Buchori, M. 22 Februari 2010. “Pemalsuan Dokumen oleh Pendidik”. *Kompas*, hlm. 7.
- Edu, L. A., dkk. 2016. *Etika dan Tantangan Profesionalisme Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Fullan, M. 2007. *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teachers College Columbia University.
- Habur, M. 2007. “Pendidikan Agama Katolik (PAK) dan Profesionalitas Guru PAK di Tengah Zaman yang Berubah”. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 5 (1): 34.
- Hendardi. 3 April 2018. “Melawan Politik Ketakutan”. *Kompas*, hlm. 6.
- Kompas. 7 Maret 2018. *Pendidikan Jadi Tumpuan*, hlm. 11.
- Kompas. 7 Maret 2018. *Daya Tarik Bidang Industri Masih Lebih Besar*, hlm. 12.
- Kompas. 20 Januari 2017. *Kearifan Lokal Topang Kurikulum Nasional*, hlm. 11.
- Kompas. 6 Januari 2016. *Ubah Pendidikan Guru demi Kualitas*, hlm. 11.
- Kompas. 31 Desember 2015. *Pengetahuan Guru tentang Pembelajaran Masih Rendah*, hlm. 9.
- Kompas. 19 Juni 2015. *Bekali Calon Guru Keahlian Lain*, hlm. 11.
- Kunandar. 2011. *Guru Profesional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusuman, A. P. 13 November 2017. “Pedagogi Berwawasan Pancasila”. *Kompas*, hlm. 7.
- Payong, M. 2015. “Guru Sebagai Pekerjaan Profesional dalam Konteks Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)”. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 7 (1): 62—69.
- _____. “Kurikulum 2013 dan Kesiapan Guru dalam Menerapkannya”. *Makalah disajikan dalam Seminar Nasional*, Prodi PGSD STKIP St. Paulus Ruteng, 9 April 2016.
- Priyatma, J. E. 27 April 2016. “Transaksi Dairing dalam Pendidikan”. *Kompas*, hlm. 7.
- Sachari, A. 2007. *Budaya Visual Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sumardianta, J. 2013. *Guru Gokil Murid Unyu*. Yogyakarta: PT Benteng Pustaka.
- Tilaar, H. A. R. 2010. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2012. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ubaedillah, A. & Rozak, A. 2012. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Group.
- Ujan, A. Ata. 2011. *Multikulturalisme*. Jakarta: Indeks.
- UNESCO. 2005. *Culture, Trade and Globalization* (Diterjemahkan oleh PeMad). Yogyakarta: Kanisius.